

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
01	Yulianti, Suzana (2002)	Evaluasi Pengendalian Intern atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Buana Talimas Textile	Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan	Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa perusahaan memiliki beberapa kelemahan dalam SPI yang perlu diperbaiki agar pengawasan di perusahaan dapat berjalan dengan baik
02	Zulfayani, Andi (2011)	Studi Evaluatif Atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar	Penelitian ini menggunakan deskriptif dan evaluative dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara, dan observasi	Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan sudah sangat baik dan SPI yang baik tersebut didukung

				dengan kebijakan-kebijakan lainnya.
03	Ali , Humaidi (2009)	Analisis Atas Sistem Pengendalian Intern Kas Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah	Penelitian deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara, dan observasi	Berdasarkan peneitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Kas BAZISDA Lotim dari sudut pandang sistem pengendalian intern kas ternyata sudah memadai.
04	Sutiana, Arip (2010)	Tinjauan atas Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Bandung	Penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan, dan studi kepustakaan	Berdasarkan peneitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Kas di PDAM Kota Bandung sudah cukup baik karena sesuai dengan teori yang dijadikan acuan namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Dengan melihat tabel di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan mengenai dana pengelolaan zakat yang melingkupi dana masuk dan dana keluar untuk didistribusikan kepada yang berhak melalui program-program yang ada pada objek dan penelitian ini dilakukan karena jumlah peneliti yang meneliti pembahasan ini sangatlah terbatas.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi

A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Wijayanto (2001) *dalam* Mardi (2011:4), Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan, sedangkan menurut Romney (2005) *dalam* Mardi (2011:4), Sistem Informasi Akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Wilkinson(1999:38)*dalam* Maulana menyebutkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi(SIA) merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya (*data, meterials, equipment, suppliers, personal, and funds*) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa

informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:3), sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan.

B. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney *dalam* David (2013: 8), sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Meningkatkan kinerja dan menurunkan biaya dari barang dan jasa.
- 2) Meningkatkan efisiensi.
- 3) Meningkatkan pengambilan keputusan.
- 4) Membagi pengetahuan.

Menurut Jones *dalam* David (2013:9) kegunaan sistem informasi akuntansi adalah:

- 1) Menghasilkan laporan eksternal.
- 2) Mendukung aktivitas rutin.
- 3) Pengambilan keputusan.

- 4) Perencanaan dan pengendalian.
- 5) Implementasi dan pengendalian internal.

Sedangkan menurut Mardi (2011:4) tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah:

- 1) Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang.
- 2) Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen.
- 3) Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari.

C. Faktor Yang Diperlukan Dalam Penyusunan Sistem Akuntansi

Menurut Baridwan (1985:7) penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang diantaranya adalah:

- 1) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai.
- 2) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan

harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian internal.

- 3) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain, dipertimbangkan *cost* dan *benefit* dalam menghasilkan suatu informasi.

D. Elemen-Elemen Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi menurut Siswanto (2007:8) terdiri dari lima elemen, diantaranya yaitu:

- 1) Formulir

Formulir merupakan dokumen pertama yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam dan dicatat dalam selembar kertas. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kali sebagai dasar dalam pencatatan dalam catatan akuntansi.

- 2) Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

3) Buku besar

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya di jurnal.

4) Buku pembantu

Buku pembantu merupakan rekening pembantu yang memperinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

5) Laporan

Laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan ada 5 yaitu: neraca, laporan L/R, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.2. Tinjauan tentang Pengendalian Internal

A. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Hartadi (1999:2) mengartikan Sistem Pengendalian Internal menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

Menurut Hartanto (1979) dalam Hartadi (1999:2) mendefinisikan sistem pengendalian internal dalam artian yang sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian *internal check* yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (*horizontal*) dengan penjumlahan melurus (*vertical*). Sedangkan dalam artian yang luas, sistem pengendalian

internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal berdasarkan *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam Boynton, Johnson, dan Kell (2003:373), mengatakan bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dari definisi-definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa, sistem pengendalian intern merupakan suatu “sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan dalam suatu instansi atau organisasi.

B. Tujuan Pengendalian Intern

Widjaja (1995:2) Memberikan beberapa tujuan dari sistem pengendalian intern yang efektif sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi: Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil keputusan yang penting. Sistem pengendalian akuntansi internal bertujuan untuk mengutamakan/ menguji kecermatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat.
- b. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya: Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak disengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat bergarga dan catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.
- c. Untuk menggalakkan efisiensi usaha: Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien.
- d. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan: Manajemen menyusun prosedur dan peratran untuk mencapai tujuan

perusahaan. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Mardi (2011: 59) tujuan pengendalian internal, yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

C. Ciri-ciri Pokok Sistem Pengendalian Intern

Menurut Baridwan (1993) dalam Vita (2010: 21) ciri-ciri pokok sistem pengendalian intern adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
2. Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang-utang, pendapatan-pendapatan, biaya-biaya.
3. Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi di setiap bagian dalam organisasi.
4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya.

D. Komponen Pengendalian Internal oleh *Committee of Sporsoring of Organization of the Treadway Commision(COSO)*

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri faktor-faktor berikut ini:

1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika

Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikannya. Pihak manajemen harus mengembangkan kebijakan yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit mendiskripsikan perilaku yang jujur dan tidak jujur. Seluruh tindakan yang tidak jujur harus secara menyeluruh diinvestigasi, dan mereka yang dianggap bersalah harus dibebastugaskan. Pegawai yang tidak jujur harus dituntut untuk membat pegawai mengetahui bahwa perilaku semacam ini tidak akan diperbolehkan.

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya operasi

Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggung jawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit

perhatian atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu.

3. Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. Dalam lingkungan bisnis global, produk dan jasa bersaing untuk merebut kepuasan customers melalui kandungan pengetahuan yang berada dalam produk jasa tersebut. Oleh karena itu, komitmen manajemen terhadap kompetensi akan mengakibatkan produk dan jasa yang dihasilkan bagi kepentingan customers berisi kandungan pengetahuan (*knowledge content*) memadai untuk memenuhi kebutuhan customers.

4. Dewan komisaris dan komite audit

Menurut Mardi (2011:63) Komite audit bertanggung jawab mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap peraturan serta standar yang terkait. Komite berhubungan secara dekat dengan auditor

eksternal dan internal perusahaan. Peninjauan ini berfungsi untuk memeriksa integritas manajemen guna meningkatkan kepercayaan publik yang berinvestasi atas kesesuaian pelaporan keuangan.

5. Struktur organisasi

Menurut Mardi (2011:63) Struktur yang jelas dan tegas menunjukkan batas wewenang seseorang melalui garis komando dan menetapkan garis otoritas serta tanggung jawab, termasuk sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas tertentu, pembagian wewenang terhadap tanggung jawab seseorang memengaruhi informasi manajemen.

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Menurut Mulyadi (2002:187) Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pengendalian intern yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang

tidak kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

b. Aktivitas Pengendalian

Menurut Mulyadi (2002:189) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Menurut Mardi (2011: 63) Aktivitas pengendalian pada dasarnya berbentuk pengendalian yang menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi dan pengendalian yang menggunakan pendekatan manual. Pengendalian berdasarkan teknologi informasi secara khusus berkaitan dengan lingkungan teknologi dari pengendalian umum dan aplikasi. Pengendalian umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan audit teknologi informasi yang ditujukan melindungi lingkungannya agar dikelola secara baik, sehingga proses pengendalian mendapatkan dukungan lebih efektif. Berkaitan dengan pengendalian aplikasi lebih

ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pada pengolahan data system komputer.

Pengendalian fisik berkaitan dengan sistem konvensional yang melakukan aplikasi prosedur manual. Namun, konsep pengendalian ini tetap memperhatikan dampak pengendalian yang berhubungan dengan lingkungan teknologi informasi, pengendalian fisik dalam perusahaan terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Kewenangan penanganan transaksi
 2. Spesialisasi tanggung jawab
 3. Format dan penggunaan dokumen pekerjaan
 4. Pengamanan harta kekayaan perusahaan
 5. Independensi pemeriksaan
- c. Penilaian Risiko

Menurut Mulyadi (2002:188) Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Sedangkan menurut Mardi (2011:64) Dampak dari perencanaan strategis dan operasional serta keuangan dan informasi akan menimbulkan risiko bisnis, beberapa kebijakan bias berakibat yang lebih besar serta

kemungkinan muncul lebih besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan biaya dan manfaat pengendalian harus direncanakan dan diperhitungkan secara cermat sehingga kegagalan dan risiko dapat diminimalisir dampaknya.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

1. Sah.
2. Telah diotorisasi.
3. Telah dicatat.
4. Telah dinilai secara wajar.
5. Telah digolongkan secara wajar.
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.

7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

e. Pemantauan

Menurut Mulyadi (2002:195) Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

Menurut Mardi (2011:65) Pengawasan yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kinerja bukan untuk menghilangkan kinerja dan prestasi perusahaan. Di beberapa perusahaan, hal ini kurang mendapat

perhatian. Pengawasan yang dilakukan, antara lain supervise yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, dan audit internal.

Dari lima komponen pengendalian internal oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*) dalam Mulyadi (2002:180) diatas, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Dalam lembaga ini lima komponen tersebut harusnya sudah diterapkan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. Adanya struktur organisasi dan pemisahan tugas
 - b. Adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan
 - c. Memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi pengeluaran kas
 - d. Adanya penganggaran sehingga dapat merencanakan apa yang menjadi kebutuhan lembaga
2. Penilaian Risiko
 - a. Adanya perencanaan anggaran untuk dapat meminimalisir risiko
 - b. Adanya pengotorisasian dan persetujuan pihak yang berwenang atas transaksi yang dilakukan

3. Aktivitas Pengendalian

- a. Telah dibuatnya dokumen tersendiri dalam setiap pekerjaan
- b. Dilakukannya pengecekan transaksi setiap bulannya
- c. Adanya pemisahan tugas yang sesuai

4. Informasi dan Komunikasi

- a. Semua transaksi yang terjadi telah dicatat serta digolongkan sesuai dengan bukti yang ada dan waktu terjadinya transaksi
- b. Bagian akuntansi setiap bulan selalu membuat laporan keuangan untuk mengetahui semua aktivitas yang terjadi di bagian keuangan
- c. Kepala bagian keuangan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan

5. Pemantauan

- a. Adanya pengawasan terhadap kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja
- b. Kepala bagian keuangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan karyawan terhadap prosedur yang telah dibuat

E. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (Mardi, 2011: 60) dikatakan bahwa agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif

seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok yang dapat mendukung prosesnya. Adapun unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka pemisahan tanggung jawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan antara setiap fungsi yang ada dan suatu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan agar tercipta mekanisme saling mengendalikan antarfungsi secara maksimal.
- b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Struktur organisasi perlu dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan yang harus disertai juga dengan prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang member otorisasi.

- c. Pelaksanaan kerja secara sehat. Tata kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditujukan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (*prudent*) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi di awal sampai akhir sendirian sehingga perlu melakukan *rolling* antar pegawai dan menghindari kecurangan.
- d. Pegawai berkualitas. Salah satu unsur pokok penggerak organisasi ialah karyawan-karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis profesionalisme atau berdasarkan *cavity* (kedekatan teman).

Unsur-unsur tersebut diatas adalah sangat penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan, agar terdapat adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu diantaranya, pada umumnya akan merintang sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses.

F. Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas

Menurut Mulyadi (2002:181) Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

Dalam penelitian Rieger (2005:1) mengatakan Pengelolaan dan pengendalian kas begitu penting bagi kepatuhan karena kas merupakan aset yang sangat likuid dan berharga. Menyiapkan lingkungan pengendalian yang baik untuk melindungi uang tunai tidak selalu membutuhkan beberapa tingkat pengendalian membuat proses pengecekan ganda atau triple. Namun, tidak jarang untuk menemukan bahwa beberapa pemeriksaan sudah sering di tempat. Jika proses kendali tunggal bekerja, tidak perlu untuk memiliki proses backup, terutama jika setiap transaksi atau item aset tidak material.

Konsep pengendalian internal yang baik didasarkan pada gagasan pengecekan dan keseimbangan serta pemisahan tugas. Perusahaan besar dengan beberapa bagian staf umumnya akan dapat menyelesaikan tugas ini

lebih mudah daripada perusahaan-perusahaan kecil dengan staf yang terbatas. Perusahaan kecil cenderung lebih mengandalkan sistem teknologi informasi (TI) dan manajemen meningkat atau pengawasan auditor internal.

Setiap pengendalian internal yang disusun dalam suatu perusahaan atau instansi pasti akan mempertimbangkan beberapa hal seperti diantaranya yang dijelaskan oleh Bastian (2006:31) yang menyatakan bahwa Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu

mempertimbangkan biaya versus manfaat (*cost versus benefit*) dalam menghasilkan suatu informasi.

Dari beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan sistem dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan sistem yang baik harus dipikirkan matang – matang terlebih dahulu agar biaya yang dikeluarkan, informasi yang dihasilkan, dan pengendaliannya akurat serta efisien. Karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Setiap organisasi memiliki struktur organisasi serta kebijakan akuntansi. Struktur organisasi yang baik dalam Bastian (2006:32) yaitu dapat menunjukkan pembagian tugas untuk masing-masing bagian dalam organisasi. Tugas masing-masing bagian secara lengkap dapat dilihat dari deskripsi pekerjaan (*job description*) yang merupakan lampiran dalam struktur organisasi. Khusus untuk bagian akuntansi, jumlah pegawai di masing-masing bagian dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan beban pekerjaan masing-masing bagian.

Kebijakan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012:1) adalah “Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan”. Proses penetapan kebijakan ekonomi dan sosial dimana suatu kebijakan itu akan beroperasi. Sasaran pilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan menggambarkan realitas

ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

G. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

1. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul - betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

H. Perlakuan Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat

Setiap lembaga zakat pastilah membutuhkan pedoman dalam pencatatan keuangan agar lembaga zakat dapat dianggap sebagai lembaga yang profesional, dengan adanya Pedoman Akuntansi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang dikeluarkan oleh Forum Zakat (2005) dan selain itu sebagai berikut:

1. Akuntansi Penggunaan Dana

a. Pengertian dan Karakteristik

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi beban dan penyaluran.

Beban adalah penggunaan dana untuk kepentingan operasional OPZ, seperti gaji, biaya administrasi, dan biaya rumah tangga OPZ.

Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan *mustahiq* atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja OPZ sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Beban dan Penyaluran berasal dari penerimaan dana sumber, dana program langsung dan dana program yang menggunakan prinsip *pool of fund*.

b. Pengakuan

Penyaluran berupa kas diakui pada saat terjadi pengeluaran. Penyaluran dana berupa non kas diakui pada saat penyerahan. Beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

c. Pengukuran

Penggunaan dana kas dinilai berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan. Penggunaan dana non kas dinilai berdasarkan nilai historis.

d. Saldo Normal

Saldo normal akun penggunaan dana adalah saldo debit. Akun ini akan bertambah dengan transaksi yang mendebitnya dan akan berkurang dengan transaksi yang mengkreditnya.

e. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk mencatat transaksi penggunaan dana:

1) Penggunaan dana untuk aktivitas penyaluran dana

a) Jurnal penyaluran kas:

Penyaluran Santunan Fakir Miskin

(Dr) Penyaluran Santunan Fakir Miskin

(Cr) Kas

b) Jurnal penyaluran non kas

Penyaluran Sembako

(Dr) Penyaluran Sembako

(Cr) Persediaan – Sembako

2) Penggunaan dana untuk aktivitas operasional (beban)

a) Jurnal pengeluaran beban gaji

(Dr) Beban gaji

(Cr) Kas

3) Penggunaan dana real account

a) Jurnal Pemberian Hutang

(Dr) Pemberian Piutang

(Cr) Kas

(Dr) Piutang

(Cr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva – piutang

b) Jurnal Pembayaran Hutang

(Dr) Pembayaran hutang

(Cr) Kas

(Dr) Hutang

(Cr) Dana yang harus disediakan untuk hutang

c) Jurnal Pembelian Aset

(Dr) Pengadaan aktiva tetap

(Cr) Kas

(Dr) Aktiva tetap

(Cr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva-aktiva tetap

f. Pengungkapan

Penggunaan dana disajikan sebesar realisasinya dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:

1. Rincian penggunaan dana untuk masing-masing beban dan penyaluran.
2. Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

I. Pengendalian Internal dengan Perspektif Islam

Pengendalian internal dalam Islam mungkin tidak dijelaskan secara langsung namun secara tersirat di dalam Al-Quran atau hadist. Pengendalian internal atau pengawasan sendiri di dalam Islam dapat dilihat pada ayat Al- Quran tepatnya Surat Ali Imron ayat 104:

رَعْنُ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَىٰ يَدِّ عُونِ أُمَّةٍ مِّنكُمْ وَلَتَكُنَّ

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ الْمُنكَ ﴿١٠٤﴾

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Pengendalian internal menurut pandangan Islam mungkin disebut *amanah* yang bermanfaat bagi manajemen untuk menjaga harta organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sikap *amanah* dalam mewujudkan keandalan pelaporan keuangan dan terciptanya akhlakul karimah yang mendukung dipatuhinya kebijakan manajemen. Selain itu, sistem pengendalian internal harus dapat mengendalikan ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Untuk pengendalian internal dalam pencatatan keuangan di sebuah lembaga zakat sangatlah diperlukan sekali.

Pengurus lembaga zakat perlu untuk menyusun sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al baqarah ayat 282. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat dijaga oleh Islam. Karena dalam penutup Surat At-Taubah dinyatakan bahwa, “...*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui,*” dan juga firman Allah SWT dalam surat al baqarah 282: Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...*”. Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam

mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses pengelolaan dana harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab.

Kaum muslim harus dapat menjaga harta pribadinya atau harta perusahaan sebagai amanah. Kedudukan harta dalam Islam sebagai sarana ibadah dan jihad. Dengan harta seseorang dapat melakukan kegiatan dengan didasari makna ibadah untuk memperoleh surga. Dengan harta itu seseorang atau kaum muslimin dapat merencanakan surganya dengan perniagaan yang ditunjukkan Allah dalam firman-nya:

تَوْمِنُونَ ﴿١٠﴾ أَلَيْمٌ عَذَابٍ مِّنْ تُنْجِيكُمْ تَجْرَةً عَلَيَّ أَذُلُّكُمْ هَلْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا

لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ لِلَّهِ سَبِيلٍ فِي وَتُجَاهِدُونَ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ

تَعْمُونَ كُنْتُمْ إِنْ ﴿١١﴾

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Ash-Shaff:10-11)

Allah memberikan harta kepada manusia agar dipergunakan untuk menyejahterakan dirinya, orang lain, kelompok lain ataupun masyarakat. Sejahtera memiliki arti hidup bahagia dengan harta yang berkah. Salah satu ciri

harta yang berkah ialah halal dan baik dalam cara memperoleh, menggunakan, ataupun menyalurkannya. Harta atau aset yang ada di perusahaan merupakan pemberian Tuhan kepada manusia untuk menyejahterakan orang-orang di dalamnya ataupun masyarakat.

Sistem pengendalian internal secara Islam juga menuntut keandalan pelaporan keuangan yang berguna untuk memberikan informasi keuangan dan kinerja organisasi bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini berarti setiap anggota organisasi diharuskan berlaku jujur dalam segala hal sebagai bagian dari sikap amanah, jujur adalah sikap terpuji karena Allah menyukai orang-orang yang bersikap jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah termasuk jujur kepada Allah, kepada Rasul, sesama, maupun bagi diri sendiri.

Sistem pengendalian internal secara Islam bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam batas-batas yang wajar dan dapat segera diketahui, dievaluasi dan diatasi jika memang hal ini terjadi. Karena di Islam sendiri diajarkan sikap *amanah* dan *tabligh* dalam segala hal terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan orang lain.

Aby yasha (2011) mengatakan bahwa Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (*amina-amanatan*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. (<http://abyyasha.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-amanah-dalam-islam/>)

Evaluasi atau penilaian diterapkan untuk memastikan kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan dan usaha agar aktivitas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan nilai-nilai agama dalam setiap tindakan. Setiap perilaku dalam ajaran Islam menekankan pada bentuk niat yaitu menyadarkan seluruh aktivitasnya sebagai wujud ibadah serta didasari pada konsep “*Lillahi Ta’ala*”. Perilaku seseorang akan mempunyai nilai jika setiap perbuatan berdasarkan pada kesadaran tentang apa yang telah diperbuatnya.

2.2.3 Tinjauan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah

A. Definisi Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat merupakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT setelah sholat sehingga semua kaum muslim wajib untuk melaksanakannya dan hal ini tercantum di dalam Al – Qur’an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan zakat.

هُ خَيْرٌ مِّنْ لَّا نَفْسِكُمْ تَقَدَّمُوا وَمَا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجْدُو ﴿١١٠﴾

110. dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya

pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah 110).

Untuk definisi dari zakat menurut Munir dan Djalaluddin (2006: 152) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak yang disebutkan dalam Al-Qur'an.). Dari pengertian di tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penurunan hak yang wajib yang terdapat di dalam harta seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan untuk definisi Infaq secara etimologi berasal dari kata *anfaqa* (Al Qur'an dan terjemah:8) adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu'. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq (Hafidudiin,1998:14-15) berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam.

Dalam hal ini infaq tidak terdapat ketentuan nisab dan mengharuskan untuk diberikan kepada mustahiq tertentu seperti ketentuan-ketentuan dalam zakat. Maka, infaq boleh diberikan kepada siapapun juga.

قَرِيْبِيْنَ فَلِلْوَالِدَيْنِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْفَقْتُمْ مَّا قَلَّ يَنْفِقُونَ مَاذَا أَسْأَلُونَكَ

لِللَّهِ فَإِنْ خَيْرٌ مِّنْ تَفَعَّلُوا أَوْ مَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْأُ

عَلَيْمٌ بِهِ

215. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Al-Baqarah: [2] 215).

Sedekah secara etimologi berasal dari kata *shadaqa* (benar). Orang yang sering bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan secara termologi syariat, pengertian sadakah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-material. (Hafiduddin,1998:15)

2.2. Tabel Definisi Zakat, Infaq dan Sedekah

No.	Nama	Keterangan
1	Zakat	<p>Definisi : Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak yang disebutkan dalam Al-Qur'an</p> <p>Hukum: Wajib jika zakat fitrah dan sudah mencapai nishab</p> <p>Nishab : 2,5 kg untuk zakat fitrah dan untuk zakat lainnya bisa lihat di lampiran</p>
2	Infaq	<p>Definisi: Mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam.</p> <p>Hukum: Sunnah bagi yang mampu</p> <p>Nishab: tidak ada</p>
3	Sedekah	<p>Definisi: Sama dengan infaq namun artiannya lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-material</p> <p>Hukum: Sunnah bagi yang mampu</p> <p>Nishab: tidak ada</p>

Dari ketentuan-ketentuan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan cara yang diberikan Islam sebagai contoh kepada kaum muslim bahwa disekitar kita masi banyak yang masi membutuhkan bantuan preokomian dan kita hidup

tidaklah sendiri, dengan kata lain ada orang-orang disekeliling kita, maka kita harus berbagi dengan mereka semua.

B. Golongan yang Berhak Menerima Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Sasaran harta zakat

لَهُمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا ۞

سَمِّنَ فَرِيضَةَ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي ق

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۞

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah [9] 60).

Menurut Rafi' (2011:49) terdapat penjelasan mengenai 8 kelompok yang berhak mendapatkan bantuan zakat yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah:

- a. Fakir (fuqara)
- b. Miskin (masakin)

Apabila kedua kata itu disebut bersama-sama masing-masing memiliki arti yang berbeda dengan yang lain. Tetapi apabila masing-masing disebut secara terpisah dari yang lain, maka kedua kata itu memiliki kesamaan arti. Dengan demikian fakir adalah orang yang mengadukan akan kefaqirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencariannya. Sedangkan miskin adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan yang melebihi kepunyaan yang dimiliki orang fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.

Jika ditinjau dari segi yang sama-sama berhajat dan membutuhkan, maka nampak dihadapan kita bahwa antara faqir dan miskin tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya ada pada intensitasnya yaitu fakir dan miskin yang berhajat dan tidak mempunyai kecukupan. Bahkan termasuk dalam katagori ini, ialah orang yang terikat untuk kepentingan dakwah dan tidak berkesempatan mencari nafkah dibidang lain.

Alhasil yang dimaksud dengan faqir dan miskin ialah orang yang tidak mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. (Rafi', 2011:50)

c. Amil

Menurut Rafi' (2011:58): "Amil atau '*amilun* adalah bentuk jamak dari mufrad (kata tunggal) '*amil* atau '*amal* yang biasa diterjemhakan dengan "yang mengerjakan atau pelaksana".

Apabila dicermati bahwa pengertian '*amil* yang biasa dikenal di Indonesia yang pada umumnya tidak diangkat oleh pemerintah, melainkan pada pihak swasta seperti organisasi sosial dan badan takmir masjid. Karena itu lahirlah UU. No 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dalam pasal 6-nya yang mengatur tatacara pembentukan badan '*amil* zakat oleh pemerintah dan dalam pasal 7 yang mengatur tatacara pengukuhan, pembinaan dan perlindungan lembaga '*amil* zakat oleh pemerintah, merupakan suatu langkah penting dalam upaya mendekatkan praktek ke'amilan dalam masyarakat dalam rumusan *amil* dalam hukum Islam. (Departemen Agama Republik Indonesia, undang-undang.Republik Indonesia. No 38 Tahun 1999:4)

Menurut Rafi' (2011:62): "Adapun mengenai hak bagian yang diberikan kepada para *'amil* atau panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya, meskipun ia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah maka ia tidak boleh mendapatkannya.

d. Muallaf

Menurut Rafi' (2011:63): "makna muallaf disini antara lain yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh".

Dengan demikian menempatkan golongan *muallaf* diatas sebagai sasaran zakat, maka akan jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan dan bukan sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi lebih dari itu juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang mengurus zakat untuk golongan *muallaf* ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.

e. Riqab (para budak)

Menurut Yusuf al-Qardawi: “Riqab adalah bentuk jama dari raqabah, yang oleh al-Qur’ran disebut sebagai budak belian laki-laki (‘abid) dan budak perempuan (amat)”. (Rafi’, 2011:65)

Sejalan dengan terhapusnya sistem perbudakan di dunia, maka perlunya penekanan makna yang lebih luas dan subtansinya terhadap kata *riqab*. Secara jelas menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain. Pengentasan buruh-buruh rendah dan buruh-burh kasar dari belunggu majikan yang menjeratnya, demikian pula usaha pembebasan orang-orang yang tertentu yang dihukum hanya lantaran yang menggunakan hak asasinya sebagai manusia termasuk dengan pengertian *riqab* yang berbentuk menerima dan zakat.

f. Al-Garimi

Al-Garimi adalah bentuk jama dari kata mufrad (tunggal) *garim*, artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan apabila *garim* (dibaca dengan ra panjang) adalah orang yang berhutang, kadang kala digunakan juga untuk orang yang mempunyai hutang. (Rafi’, 2011:66).

Menurut Yusuf al-Qardawidalam Rafi’ (2011):“orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masing-masing

mempunyai hukum tersendiri. *Pertama*, orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan atau kepentingan diri sendiri dan *kedua*, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

g. *Sabilillah*

Jalan yang menyampaikan ada ridha Allah SWT, baik aqidah maupun pribadi. *Sabilillah* bukan hanya terbatas pada orang yang melakukan peperangan saja untuk membela Islam, melainkan orang yang melakukan kebaikan, oleh sebab itu boleh-boleh saja zakat diberikan untuk pada orang yang mengkafani jenazah, memakmurkan masjid dan lain-lain.

h. *Ibnu as-Sabil*

Ibnu as-Sabil diartikan sebagai musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk kemasiatan. Ia diberi zakat sekedar hanya untuk sampai pada tempat tujuan yang dimaksud, atau samai ketempat dimana ia menyimpan harta benda. *Ibnu as-sabil* bisa juga orang kaya maupun orang yang tidak mampu, yang jelas ketika dalam perjalanan ia kehabisan bekal sebelum sampai ketempat tujuan. (Rafi', 2011:67)

C. Pola pendistribusian dana zakat

Menurut Mufraini (2006:146-147) dana zakat secara pendistribusiannya mempunyai dua cara, yaitu dengan konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara produktif saat ini sudah merupakan cara pelaksanaan yang lebih mukthair sebagai pendaayagunaannya sendiri. Untuk pendaayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikatagorikan dalam empat bentuk.

- a Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b Distribusi bersifat “konsuntif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c Distribusi bersifat “produktif tradisional” dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal pedagang, pengusaha kecil.

Menurut Mufraini (2011:149-151) bahwa konsep dari pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada:

- a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq
- b. Upaya pemenuhan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologis
- c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Dari uraian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pola pendistribusian dana zakat baik secara konsumtif ataupun produktif dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memberikan hasil kepada mustahiq (orang yang menerima zakat). Bentuk inovasi inilah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) saat ini sedang terjadi pada lingkungan masyarakat kita sendiri, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan masa depan generasi bangsa ini menjadi lebih baik, serta mampu untuk mengikuti perkembangan zaman.

D. Lembaga pengelola zakat

Sudah seharusnya hasil harta zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (seperti akan melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan). Hal ini bisa dipahami karena membayar zakat merupakan hal disyaratkan didalam Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya.

Menurut Hafidhuddin (2008:98) bahwa pengelolaan harta zakat oleh lembaga pengelola zakat (amil zakat), apalagi yang memiliki kekuatan hukum (formal) akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya:

- a. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah dan sirah nabawiyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in.
- b. Untuk menjamin kepastian dan disiplin para pembayar zakat.
- c. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- d. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- e. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah

sah, akan tetapi di samping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Karena itu fungsi amil sebagai pengelolah zakat merupakan hal yang penting guna mengatur pengambilan maupun pendistribusian. Dengan demikian zakat disamping amal yang bersifat kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan, juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif.

Pemerintah Indonesia mengatur pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama No .581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam BAB II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. (Departemen Agama Republik Indonesia, undang-undang:3)

Saat ini pendayagunaan zakat sudah didasarkan pada program-program yang disusun untuk memperhatikan kondisi mustahiq dan skala prioritas.

E. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana ZIS pada Lembaga Zakat

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Hakim (2013) Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Fokus evaluasi adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program. (<http://www.zainalhakim.web.id/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli.html>)

2. Pengertian Zakat, Infaq dan sedekah

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Munir dan Djalaluddin, 2006: 152). Sedangkan untuk definisi Infaq secara etimologi berasal dari kata *anfaqa* (Al Qur'an dan terjemah:8) adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu'. Dan yang terakhir pengertian dari

sedekah yang secara etimologi berasal dari kata *shadaqa* (benar).Orang yang sering bersedakah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan secara termologi syariat, pengertian sadakah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-material. (Hafiduddin,1998:15).

3. Pengendalian Zakat, Infaq, Sedekah

Berkaitan dengan sistem pengendalian internal, maka yang dimaksud dengan evaluasi sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengendalian internal pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan mengacu kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program pengendalian internal.

Dalam pengendalian pengelolaan dana zakat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh suatu lembaga zakat diantaranya:

Kelembagaan:

a Struktur :

Faktor Penentu Struktur Organisasi

Sebagian organisasi terstruktur pada garis yang cenderung mekanistik sedangkan sebagian yang lainnya mengikuti karakteristik

organik. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi:

1. Strategi

Sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, wajar kalau strategi dan struktur harus terkait erat sekali. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan suatu perubahan yang signifikan dalam strategi organisasinya, maka struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung serta mendukung perubahan tersebut.

Strategi inovasi merupakan strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Strategi minimalisasi biaya adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Strategi imitasi adalah strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti.

2. Ukuran Organisasi

Ukuran sebuah organisasi secara signifikan memengaruhi struktur suatu organisasi sehingga akan menyesuaikan.

3. Teknologi

Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak

memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa.

4. Lingkungan

Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya.

(<http://abdirachmadi.blogspot.com/2012/11/struktur-organisasi-dan-contoh.html>)

b Perekrutan karyawan :

Perekrutan karyawan yang tepat dalam sebuah organisasi khususnya lembaga zakat yang mengelola dana masyarakat sangatlah diperlukan agar lembaga tersebut dapat menjalankan kegiatannya sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berdasarkan hal inilah suatu lembaga itu perlu memilih yang terbaik (yang memenuhi kualifikasi) menjadi prinsip dalam seleksi dan promosi untuk suatu jabatan.

Menurut Djalaluddin (2007:25) yang mendapati beberapa kisah dari Al Qur'an yang mengisyaratkan kaidah tentang orang yang

terbaik untuk menduduki suatu jabatan. Ada dua kriteria yang menjadi standar penilaian dalam memilih atau mempromosikan pegawai yaitu *al quwwah* (kekuatan) dan *al amanah*.

Kekuatan memiliki arti yang luas, tergantung oleh jenis dan karakter suatu pekerjaan dan profesi. Kekuatan disini meliputi kemampuan intelektual dan ketrampilan tertentu yang dibutuhkan untuk jenis dan karakter pekerjaan tertentu pula.

Untuk Amanah sendiri mengandung arti segala yang dipercayakan kepada seorang untuk dijaga, baik ibadah maupun titipan-titipan dalam muamalah. Sedangkan amanah menurut Hafidhuddin dan Tandjung (2003:102) adalah keinginan untuk memenuhi sesuatu dengan ketentuan dan amanah dari Allah swt. kepada manusia ada dua hal yaitu ibadah dan khalifah.

c Pembagian kerja :

Alasan diadakan pembagian kerja adalah bahwa seseorang tidak akan mampu melakukan semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi seorang diri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya pembagian kerja, karyawan dituntut tanggung jawabnya di dalam penyelesaian setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Spesialisasi pekerjaan diperlukan karena dalam pembagian kerja terjadi pembagian

fungsi-fungsi dimana setiap fungsi tersebut memerlukan keahlian khusus untuk menyelesaikan setiap pekerjaan.

Untuk mengukur pembagian kerja tersebut digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

a Penempatan karyawan

Penempatan karyawan ialah bahwa setiap pegawai atau karyawan telah ditempatkan sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki sebab ketidaktepatan dalam menetapkan posisi karyawan akan menyebabkan jalannya pekerjaan menjadi kurang lancar dan tidak maksimal.

b Beban kerja

Beban kerja adalah tugas pekerjaan yang dipercayakan untuk dikerjakan dan tanggung jawabkan oleh satuan organisasi atau seorang pegawai tertentu. Beban kerja yang harus dilaksanakan karyawan hendaknya merata, sehingga dapat dihindarkan dari adanya seorang karyawan yang mempunyai beban kerja terlalu banyak atau terlalu sedikit. Namun demikian beban kerja yang merata ini tidak berarti bahwa setiap karyawan di perusahaan tersebut harus tetap sama beban kerjanya.

c Spesialisasi pekerjaan

Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau ketrampilan khusus. Spesialisasi pekerjaan sangat

diperlukan dalam setiap organisasi karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan keterbatasan sendiri. Agar semua tugas pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu sekali adanya spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan bukan berarti merupakan tujuan mengkotak-kotakan pegawai atau karyawan (http://trickyeko.blogspot.com/2012/03/1-keputusan-manajerial-menentukan_09.html)

Operasional:

a Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat pada suatu LAZ atau BAZ pasti akan didasarkan pada *nishab* yang sudah ada dan tercantum dalam hadist-hadist yang ada yang kemudian disimpulkan oleh para alim ulama dan untuk di Indonesia sendiri sudah terdapat dasar perhitungan *nishab* yang ditentukan dalam Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1991 (lihat lampiran)

Dalam pelaksanaan suatu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai teknik pengumpulan zakat seperti:

1. Membentuk tim penyuluh guna melaksanakan sosialisasi sadar zakat, infaq dan shadaqah melalui dinas/ instansi, BUMN/ BUMD, asosiasi pengusaha muslim dan organisasi lainnya.
2. Membentuk pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

3. Melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat melalui berbagai jalur seperti penerbitan buletin, pembuatan brosur, pamflet serta pemasangan baliho
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai peningkatan peangumpulan ZIS
5. Mengoptimalkan petugas juru pungut dari berbagai daerah.

b Penyaluran Zakat

Untuk penyaluran atau pendistribusian zakat telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al Quran yang menyebutkan ada beberapa golongan yang perlu untuk diberikan zakat sehingga lembaga amil

وَهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةُ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُد

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At – Taubah ayat 60).

Seperti yang terdapat dalam Surat At – Taubah ayat 60 ada beberapa golongan yang perlu untuk diberikan zakat diantaranya adalah :

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dengan adanya dasar tersebut sebuah LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat) tidak perlu kesulitan untuk menyalurkan zakat yang dikelolanya tinggal menentukan standar penilaian untuk masing-masing golongan.

1. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelaksana Evaluasi

Proses evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

- 1) Memahami aktivitas organisasi dan unsur Sistem Pengendalian Internal
- 2) Mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern Organisasi telah berfungsi
- 3) Mengetahui desain sistem pengendalian yang berlaku
- 4) Mengetahui cara kerja sistem tersebut;

- 5) Menganalisis desain sistem yang berlaku untuk mengetahui apakah sistem tersebut dapat memberikan keyakinan yang tinggi bagi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

